

PENGEMBANGAN EKONOMI TEMBAKAU NASIONAL: KEBIJAKAN NEGARA MAJU DAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

Development of National Tobacco Economy: Developed Country Policy and Lesson Learned for Indonesia

Muchjidin Rachmat

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

Indonesian tobacco industries face a dilemmatic situation and controversy between its role in the national economy and the resulting negative impact to public health and the environment. This paper discusses the controversies and dilemmas of the tobacco industry as well as alternative solutions. Major contribution to the national economy in the tobacco industry is as a source of excise revenue, while the other roles such as employment and income is relatively small. The biggest beneficiaries of the Indonesian tobacco industry is enjoyed by a few large-scale cigarette industries with partly taken by the multinational tobacco companies, while the people of Indonesia should accept a negative influence of tobacco in the form of decreased health status and a huge health care costs. Without a coherent policy, Indonesia will become a potential market for large-scale cigarette industries of national and multinational companies. Explicit government policies are urgently required to minimize the negative impact of cigarettes. In line with those policies, Indonesia should sign and ratify the Framework Convention for Tobacco Control (FCTC.) as the world legal umbrella of tobacco control. Strict government policies are suggested to protect the community from the negative impact of cigarette smoking through the implementation of pricing policies, setting tax/cigarette tax, control of tobacco advertisement, promotion and sponsorship by tobacco companies for various events, and the establishment of free region/area from cigarette smoke. With the increasing health and anti-smoking movement in the world, the tobacco industry in the long-term is predicted to decline. These conditions should be anticipated and used a reference in determining tobacco policy in Indonesia. Since the early stage, the government should anticipate such conditions in the form of gradual substitution of the tobacco industry and tobacco plants to other industry and valuable crops.

Key words : *tobacco economy, cigarettes, FCTC*

ABSTRAK

Industri tembakau Indonesia dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi perannya dalam perekonomian nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Makalah ini membahas tentang kontroversi dan dilema industri tembakau serta alternatif solusinya. Sumbangan utama industri tembakau dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan cukai, sedangkan

perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan devisa relatif kecil. Penerima manfaat terbesar dari industri tembakau adalah industri rokok skala besar dan perusahaan rokok multinasional, sementara masyarakat Indonesia menerima pengaruh negatif rokok berupa penurunan derajat kesehatan dan biaya kesehatan yang besar. Tanpa adanya kebijakan yang tegas, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi industri rokok skala besar nasional dan multinasional. Kebijakan yang tegas pemerintah diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif rokok. Sejalan dengan itu Indonesia harus menandatangani dan meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control–FCTC.*) sebagai payung hukum pengendalian tembakau. Di samping itu pemerintah harus melindungi masyarakat terhadap dampak negatif rokok melalui penerapan kebijakan harga rokok, penetapan pajak/cukai rokok, pengendalian iklan rokok, kegiatan promosi dan sponsor oleh perusahaan rokok serta penetapan daerah/kawasan bebas dari asap rokok. Dengan semakin meningkatnya gerakan kesehatan dan anti rokok di dunia, maka dalam jangka panjang industri rokok dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Kondisi ini perlu diantisipasi dan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan tembakau di Indonesia. Sejak awal perlu antisipasi dalam bentuk upaya substitusi secara bertahap dari industri rokok dan tanaman tembakau ke industri dan tanaman lain yang lebih bermanfaat.

Kata kunci : *ekonomi tembakau, rokok sigaret, konvensi pengendalian tembakau*

PENDAHULUAN

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Produk utama tembakau yang diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. Industri tembakau di Indonesia berkembang dengan pesat sejalan dengan peningkatan jumlah perokok, hal ini berkaitan dengan kebiasaan merokok masyarakat Indonesia. Budiman dan Onghokham (1987) mengemukakan kebiasaan merokok bagi masyarakat Indonesia telah populer sejak abad 16-an. Dilaporkan bahwa pada masa kerajaan Mataram pada abad 16-an kebiasaan merokok telah populer di masyarakat, seperti ditunjukkan oleh pendapat bahwa bahwa raja Mataram *Sultan Agung* merupakan seorang perokok berat, dan adanya kisah *Roro Mendut* yang menjual rokok untuk membayar pajak.

Industri rokok di Indonesia tumbuh dengan pesat, dari semula hanya industri rumah tangga menjadi industri berskala besar nasional dan multinasional. Sejalan dengan itu industri rokok juga telah berperan dalam perekonomian nasional sebagai penyumbang penerimaan negara melalui cukai. Tumbuhnya industri rokok juga diikuti oleh berkembangnya pertanaman tembakau yang diusahakan petani di banyak daerah, dan telah berperan sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat serta perekonomian daerah.

Berkembang pesatnya industri rokok dan jumlah perokok mengundang penentangan oleh terutama kelompok masyarakat yang peduli kesehatan dan lingkungan. Banyak bukti menunjukkan bahwa rokok memicu berbagai penyakit

dan berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Penentangan terhadap rokok terjadi di hampir semua negara dengan tingkat yang berbeda. Kesadaran akan bahaya merokok terhadap kesehatan di negara maju menyebabkan tingkat penentangan masyarakat di negara maju relatif kuat dibanding negara berkembang atau negara terbelakang.

Perusahaan rokok secara gencar terus mempromosikan produk rokoknya melalui berbagai cara. Perusahaan multinasional rokok yang umumnya dimiliki dan berbasis di negara maju telah mengantisipasi dinamika masyarakat di negara maju. Untuk itu mereka telah berupaya mengembangkan basis produksi dan pasarnya ke negara berkembang dan negara kurang maju. Perusahaan multinasional telah berupaya menembus monopoli dan dominasi perusahaan rokok nasional di banyak negara berkembang untuk masuk dan mengembangkan pasarnya. Dalam dekade terakhir, Industri rokok multinasional telah mengalihkan pasarnya dari negara maju ke negara lain terutama ke negara berpenduduk besar terutama China, India dan Indonesia. Hal ini terlihat dari terjadinya pergeseran dalam produksi, konsumsi, ekspor dan import dari dominasi negara maju ke negara sedang berkembang (Hadi *et al.*, 2008). Dengan jumlah penduduk besar dan adanya budaya merokok yang tinggi, Indonesia dinilai merupakan pasar potensial rokok.

Situasi ini menjadikan industri tembakau menjadi industri yang kontroversi disatu sisi merupakan aset nasional yang berperan dalam perekonomian nasional dan di sisi lain berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Makalah ini akan membahas tentang kontroversi industri tembakau yaitu berkaitan dengan peran positif industri rokok dalam perekonomian nasional dan peran negatif rokok bagi kesehatan masyarakat, situasi industri rokok di Indonesia dan dilema kebijakan tembakau di Indonesia.

PERAN TEMBAKAU DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Peran tembakau dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari beberapa indikator seperti perannya dalam penerimaan negara (PDB), sumber lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Industri tembakau secara luas mencakup sektor bahan baku primer daun tembakau dan cengkeh dan industri pengolahan rokok. Berdasarkan hasil analisa Input-Output tahun 2005 industri tembakau memberikan kontribusi 1,66 persen terhadap total PDB nasional. Kontribusi terbesar berasal dari Industri rokok sebesar 1,56 persen, sedangkan sektor bahan baku tembakau dan cengkeh hanya berkontribusi masing masing sebesar 0,036 persen dan 0,067 persen. Namun demikian industri rokok merupakan salah satu industri pertanian (agroindustri) yang menonjol di Indonesia. Terhadap Agroindustri tersebut peran industri rokok mencapai 13,13 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Kontribusi Sektor Tembakau, Cengkeh dan Industri Rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 2005

Sektor	Nilai (Jutaan Rp)	Persentase (%)		
		Thd Total PDB	Thd Total Agro Industri	Thd Agrib. Rokok
Tembakau (Sektor 11)	1.043.243	0,03	0,31	2,18
Cengkeh (Sektor 14)	1.920.290	0,07	0,57	4,02
Industri rokok (Sektor No. 34)	44.783.773	1,56	13,33	93,80
Agribisnis Rokok (Sektor 11,14 & 34)	47.747.306	1,66	14,21	100,00
Total Agroindustri	335.850.665	11,67	100,00	
Total PDB Indonesia Tahun 2005	2.876.891.630	100,00		

Sumber : Diolah dari Santoso *et al.* (2009) Berdasarkan data Tabel I-O Tahun 2005

Peran bahan baku primer tembakau dan cengkeh terhadap total perkebunan dan pertanian relatif kecil. Nilai produksi usahatani tembakau dan cengkeh terhadap nilai produk perkebunan masing-masing sebedar 1,54 persen dan 2,83 persen; sementara terhadap nilai produk pertanian masing-masing hanya 0,27 persen dan 0,49 persen (Tabel 2). Kondisi ini sejalan dengan kecilnya peran areal pertanaman dan jumlah petani tembakau di Indonesia. Dalam tahun 2007 luas areal tembakau mencapai 198 ribu hektar (sekitar 0,9% total areal perkebunan Indonesia), sementara jumlah petani yang terlibat dalam usahatani tembakau hanya 554,5 ribu rumah tangga petani atau sekitar 8,0 persen dibandingkan dengan rumah tangga petani pekebun sebesar 6880 ribu RT, atau hanya 2,1 persen dari total rumah tangga pertanian sebesar 25 579 ribu RT (BPS, 2008).

Tabel 2. Kontribusi Tembakau dan Cengkeh Terhadap Sub Sektor Perkebunan dan Sektor Pertanian di Indonesia, 2005

Sektor	Nilai (Jutaan Rp)	Prosentase	
		Terhadap Sektor Perkebunan	Terhadap Total Pertanian
Tembakau	1.043.243	1,54	0,27
Cengkeh	1.920.290	2,83	0,49
Perkebunan	67.736.887	100,00	17,29
Pertanian	391.782.680		100,00

Sumber : Santoso *et al.* (2009) Berdasarkan data Tabel I-O Tahun 2005

Dalam peranannya terhadap lapangan kerja, secara keseluruhan industri tembakau menyerap tenaga kerja pada industri tembakau sekitar 4,154 juta tenaga kerja, dimana 93,77 persen diserap pada kegiatan usahatani termasuk pasca panen, sedangkan tenaga kerja di sektor pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6,23 persen (Tabel 3).

Tabel 3. Penyerapan Tenaga Kerja Agroindustri Tembakau di Indonesia, 2008

Bidang Kegiatan	Tenaga Kerja Tembakau	
	Jumlah (ribu tenaga)	Persen
1. Usahatani	3895,775	93,77
a. Petani ¹⁾	1109,000	26,69
b. Buruh Tani ²⁾	1857,850	44,72
c. Pasca Panen ³⁾	928,925	22,36
2. Industri Rokok ⁴⁾	258,678	6,23
3. Total	4154,453	100,00

Keterangan :

- 1) dihitung dari jumlah Rumah tangga Petani Tembakau dikalikan 2 orang (asumsi kegiatan pengelolaan tembakau hanya dilakukan oleh suami dan istri petani)
- 2) dihitung dari luas area tembakau (ha) dikalikan jumlah tenaga kerja buruh yang terlibat dalam pengusahaan usahatani tembakau per hektar, sekitar 10 buruh per hektar
- 3) dihitung dari jumlah buruh yang terlibat dalam kegiatan pasca panen tembakau seperti (merajang, penjemuran, sortir, mengoven) yaitu 5 orang per hektar
- 4) dikutip dari Barber *et al.* (2008)

Hasil studi Santoso *et al.* (2009) menunjukkan bahwa nilai pengganda pendapatan sektor industri rokok memiliki nilai terkecil kedua dibandingkan dengan pengganda agroindustri lainnya. Nilai pengganda sebesar 0,127 menunjukkan kondisi bahwa apabila terjadi kenaikan output pertanian sebesar Rp 1 juta akan menyebabkan kenaikan pendapatan sektor perekonomian sebesar Rp 127 juta. Kondisi ini karena industri rokok merupakan industri tunggal yang tidak keterkaitannya kecil. Selanjutnya hasil kajian Sudaryanto *et al.* (2009) dalam perekonomian nasional, peranan agribisnis tembakau dan industri rokok dalam penciptaan nilai *output*, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja kurang signifikan, namun kedua sektor tersebut mempunyai angka pengganda (*multiplier effect*) *output*. Angka pengganda untuk tenaga kerja agribisnis tembakau lebih besar daripada industri rokok. Hal ini terjadi karena dalam perdagangan internasional, komoditas tembakau dan rokok lebih banyak mengurus daripada menghasilkan devisa negara, sedangkan agribisnis tembakau mampu menarik sektor hulu dan mendorong sektor hilir untuk berkembang, sementara industri rokok hanya mampu mendorong sektor hilir saja.

Peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Nilai penerimaan dari cukai yang dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dari Rp 11,1 triliun pada tahun 2001 menjadi sekitar Rp 47,0 triliun pada tahun 2008, suatu peningkatan rata-rata 53 persen per tahun (Tabel 4). Penerimaan nilai cukai sebesar 47 triliun pada tahun 2008 merupakan nilai satu persen dari penerimaan total negara. Peningkatan cukai tembakau tersebut terutama karena kebijakan peningkatan harga jual eceran rokok tarif cukai hasil tembakau, sementara produksi rokok memperlihatkan kecenderungan menurun.

Tabel 4. Perkembangan Cukai Tembakau di Indonesia, 2000-2008

Tahun	Cukai Rokok (triliun rupiah)
2000	11,1
2001	17,1
2002	22,8
2003	25,8
2004	28,6
2005	33,3
2006	37,8
2007	44,7
2008	47,0

Sumber: Tahun 2000- 2004 : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2008
 Perkiraan cukai tembakau 98,2% dari total cukai
 Tahun 2005-2008 : RAPBN dan Th 2009, Dep. Keuangan, 2008

Indonesia disamping sebagai eksportir produk tembakau juga sebagai importir, baik produk daun tembakau maupun rokok. Secara keseluruhan posisi Indonesia dalam perdagangan dunia tembakau adalah net eksportir, dalam arti nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Devisa terutama berasal dari ekspor rokok karena nilai ekspor rokok lebih besar dari nilai impor rokok, namun untuk daun tembakau kecenderungan net importir. Dalam tahun 2007 surplus perdagangan rokok sebesar US\$ 253, 87 juta (nilai ekspor rokok sebesar US\$ 304,45 juta dan nilai impor rokok sebesar US\$ 50,58 juta); sedangkan pada daun tembakau, terjadi defisit sebesar US\$ 96, 94 juta (nilai ekspor US\$ 120,27 juta dan nilai impor US\$ 217,21 juta). Dengan demikian secara total pada tahun 2007 perdagangan tembakau indonesia surplus sebesar US\$ 156,93 juta.

DAMPAK NEGATIF ROKOK

Tembakau merupakan tanaman yang menghasilkan bahan penikmat, umumnya dikonsumsi untuk rokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Tar adalah senyawa *polinuklir hidrokarbon aromatika* yang bersifat karsinogenik.

Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa rokok merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Dalam laporan tahunannya, WHO (2008) menyatakan

bahwa dalam abad 20 sekitar 100 juta penduduk meninggal karena rokok. Apabila tidak ada upaya mengendalikan tembakau/rokok maka selama abad 21 sedikitnya satu milyar penduduk dunia akan mati sia sia, suatu peningkatan sebesar 10 kali lipat dibandingkan kematian akibat rokok pada abad 20. Saat ini setiap tahunnya sekitar 5,4 juta penduduk meninggal karena rokok dan pada tahun 2030 penduduk yang meninggal karena tembakau akan meningkat menjadi 80 juta penduduk setiap tahunnya. Dari penduduk meninggal tersebut 80 persen akan terjadi di negara berkembang. Tingkat kematian akibat tembakau jauh lebih tinggi dibandingkan kematian karena penyakit TBC, HIV/AIDS dan malaria. Berbagai penyakit dapat ditimbulkan akibat rokok dan menyerang di hampir semua bagian tubuh manusia. Pengaruh negatif rokok dirasakan secara langsung bagi perokok (perokok aktif) dan bagi yang tidak merokok (perokok pasif).

World Lung Foundation dan American Cancer Society (ACS) memperkirakan biaya yang harus ditanggung akibat tembakau di dunia mencapai \$ 500 billion per tahun dalam bentuk belanja kesehatan secara langsung, penurunan produktivitas dan kerusakan lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Hasbullah (2009), menghasilkan perkiraan biaya kesehatan karena rokok di Indonesia dalam tahun 2001 sekitar US\$ 2,4 milyar atau Rp 20 triliun. Di beberapa negara lain taksiran biaya sosial akibat rokok adalah: (a) Australia antara 2,1 persen - 3,4 persen dari GDP, (b) Canada sebesar 1,3 persen - 2,2 persen dari GDP, (c) USA sebesar 1,4 persen - 1,6 persen dari GDP, (d) China sebesar 0,06 persen dari GDP, (e) Hongkong sebesar US\$ 688 juta, (f) Taiwan: US\$397,7 juta, dan (g) Vietnam: 0,22 persen dari GDP.

KERAGAAN PEROKOK DAN INDUSTRI ROKOK DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara dengan penduduk ketiga dengan penduduk terbesar perokok setelah China dan India. Data WHO (2008) juga menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan proporsi penduduk laki-laki perokok kedua terbesar setelah Rusia. Proporsi penduduk laki-laki Indonesia yang merokok sebesar 65,3 persen, sementara Rusia berada pada urutan pertama sebesar 70,2 persen. Negara lain yang masuk dalam sepuluh besar negara dengan penduduk laki dengan proporsi perokok tertinggi adalah Belarus, Ukraina, Yunani, Laos, Yordania, Tonga, China dan Korea. Sebagian wanita Indonesia juga perokok namun dengan proporsi yang relatif kecil yaitu 4,20 persen (Tabel 5).

Perokok angkatan muda juga perlu mendapat perhatian, dari data WHO, tingkat partisipasi remaja laki-laki di Indonesia relatif tinggi yaitu 24,10 persen lebih tinggi dari rata rata remaja dunia sebesar 21,44 persen. Pada tingkat dunia proporsi remaja wanita yang merokok juga relatif besar yaitu 14,9 persen, namun proporsi remaja wanita perokok di Indonesia cukup rendah hanya 4,0 persen (Tabel 6).

Tabel 5. Proporsi Perokok di Indonesia dan Menurut Kawasan di Dunia, 2008

Kelompok Negara	Jumlah Negara	Perokok Produk Tembakau ¹⁾ (%)		Perokok Sigaret (%)	
		Laki	Wanita	Laki	Wanita
Afrika	46	19,99	3,48	19,99	3,48
Amerika	35	29,72	26,66	28,58	14,01
Timur Tengah	22	32,82	3,48	31,07	2,66
Eropa	53	40,83	20,9	40,83	20,90
Asia Tenggara	11	40,24	7,41	39,79	6,00
Pasifik Barat	27	45,01	13,93	44,3	13,67
Dunia	194	33,52	14,10	33,00	11,61
Indonesia	-	65,30	4,20	61,80	3,70

1) Produk tembakau mencakup rokok kretek, rokok putih, cerutu dan lainnya
 Sumber : Manpower, WHO, 2008

Tabel 6. Proporsi Perokok Remaja di Indonesia dan Menurut Kawasan di Dunia, 2008

Kelompok Negara	Jumlah negara	Perokok produk tembakau ¹⁾ (%)		Perokok sigaret (%)		Merokok di rumah (%)	Merokok diluar rumah (%)
		Laki	Wanita	Laki	Wanita		
Afrika	46	19,59	12,11	12,98	5,37	29,73	49,26
Amerika	35	21,49	17,54	15,59	13,27	39,59	51,64
Timur Tengah	22	23,37	13,65	11,37	3,84	42,45	45,84
Eropa	53	21,99	16,67	19,86	15,57	77,7	83,93
Asia Tenggara	11	21,30	10,94	15,61	5,48	45,77	61,28
Pasifik Barat	27	21,94	15,45	16,77	10,36	48,19	56,52
Dunia	194	21,44	14,90	15,82	10,11	49,54	60,46
Indonesia	-	24,10	4,00	23,9	1,90	64,7	81,50

1) Produk tembakau mencakup rokok kretek, rokok putih, cerutu dan lainnya
 Sumber : Manpower, WHO, 2008

Jenis rokok yang diproduksi di Indonesia adalah rokok kretek dan rokok putih. Penurunan produksi rokok Indonesia terutama terjadi pada rokok putih dan tampaknya Industri rokok lebih mengutamakan produksi rokok kretek. Proporsi produksi rokok kretek terus meningkat yaitu dari 87,19 persen (pada tahun 1999) menjadi 93,10 (pada tahun 2007). Rokok kretek adalah rokok khas Indonesia dan umumnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan memperbesar produksi rokok kretek dan mengurangi rokok putih berarti Industri rokok telah mengkonsentrasikan untuk mengeksploitasi lebih besar potensi pasar rokok di dalam negeri.

Dari strukturnya, industri rokok Indonesia bersifat oligopoli. Sejumlah 77,9 persen produksi dan pasar rokok Indonesia dikuasai oleh empat perusahaan rokok besar yaitu PR Gudang Garam (31,7%); H.M. Sampurna (25,9%); PR Djarum (17,2%), PR Bentul (3,1%) dan sisanya sejumlah 22,1 persen

diperebutkan oleh ratusan perusahaan rokok kecil dan rumah tangga. Saat ini perusahaan rokok multinasional telah masuk dan menguasai kepemilikan industri rokok domestik dimana PR Bentul telah dibeli oleh BAT dan HM sempurna telah dibeli oleh Philip Moris.

Dengan kondisi demikian perusahaan rokok skala kecil dan rumah tangga semakin terdesak karena kurang bersaing dan dapat dipastikan akan semakin menyusut. Dengan situasi ini berarti manfaat terbesar dari berkembangnya industri rokok dinikmati oleh perusahaan besar rokok tersebut, sementara masyarakat hanya memperoleh dampak negatif rokok bagi kesehatan dan lingkungan dan menanggung biaya kesehatan yang cukup besar. Manfaat industri rokok bagi masyarakat hanya dinikmati oleh petani tembakau tertentu dan buruh pabrik rokok.

Dapat dikemukakan bahwa pelaku kegiatan produksi daun tembakau dunia dilakukan oleh jutaan petani, sementara itu pelaku industri rokok (pasar tembakau) dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan besar. Keadaan ini memunculkan pola perdagangan tembakau dan rokok yang oligopsoni dan oligopoli, dimana perusahaan rokok secara bersama sama dapat mengatur harga bahan baku (daun tembakau) dan harga output (rokok).

KEBIJAKAN NEGARA MAJU TERHADAP TEMBAKAU

Sejalan dengan menguatnya norma kepedulian masyarakat akan kesehatan dan lingkungan, penentangan terhadap rokok semakin meluas terjadi di hampir semua negara dengan tingkat yang berbeda. Kesadaran akan bahaya merokok terhadap kesehatan di negara maju menyebabkan tingkat penentangan masyarakat di negara maju relatif kuat dibanding negara berkembang atau negara terbelakang. Besarnya desakan kelompok anti tembakau menyebabkan pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak lagi memberikan dukungan kepada pengembangan tembakau, baik secara politis, ekonomi (perlindungan, subsidi, dll) maupun hukum (restriksi penggunaan tembakau). Bahkan dalam beberapa waktu lalu pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan Undang-Undang tentang kontrol tembakau dan proteksi keluarga dari rokok. Dengan adanya Undang- Undang tersebut pemerintah mengatur peredaran dan perdagangan rokok. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan produksi, konsumsi dan perdagangan produk tembakau dari AS dan UE, serta mempengaruhi industri rokok di negara tersebut. Dinamika yang terjadi di negara dunia juga terjadi di Indonesia, penentangan terhadap anti rokok telah tumbuh dan semakin kuat.

Dalam penanggulangan endemi tembakau, WHO mengeluarkan enam rekomendasi langkah, yaitu: (1) memonitor penggunaan tembakau dan pencegahannya; (2) memproteksi masyarakat untuk merokok (menggunakan) tembakau; (3) membantu jalan keluar untuk menghentikan penggunaan tembakau;

(4) memperingatkan akan bahaya tembakau; (5) melarang iklan, promosi dan sponsorship perusahaan tembakau; dan (6) peningkatan pajak tembakau. Rekomendasi WHO tersebut dijabarkan dalam lima kebijakan utama yaitu : (a) penetapan harga rokok, (b) penetapan tarif rokok, (c) pembatasan iklan rokok, (d) larangan dan pembatasan promosi dan sponsorship oleh perusahaan rokok, dan (e) pembatasan kawasan bebas rokok.

Salah satu rekomendasi WHO untuk mengurangi perokok adalah dengan penerapan harga rokok yang tinggi. Harga rata rata rokok di dunia pada tahun 2008 adalah \$ 3,50 per bungkus berisi 20 batang sigaret. Secara rata-rata harga rokok tertinggi berada di kawasan Eropa sedangkan harga terendah berada di kawasan Timur Tengah. Harga rokok paling tinggi dijumpai di Lesotho (\$ 12,86 /bungkus) dan harga terendah di Laos sebesar \$ 0,22/bungkus. Harga rokok di Indonesia sebesar (\$ 2,35/bungkus) berada di bawah harga rata-rata dunia \$ 3,50 per bungkus. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah perokok dengan semakin murah harga rokok.

Salah satu langkah untuk meningkatkan harga rokok adalah dengan meningkatkan pajak/cukai rokok. Penetapan pajak/ cukai umumnya dalam bentuk pajak penjualan *ad valorem* sebagaimana juga diterapkan di Indonesia. Rataan dunia pajak rokok sebesar 41,81 persen dari harga rokok dengan kisaran antara 2 persen sampai 84 persen dari harga rokok (Tabel 7). Pajak/cukai rokok terendah (2%) dijumpai di Benin, S. Vincent dan Libia; sedangkan negara dengan pajak rokok tertinggi (84%) dijumpai di negara Niue, kawasan Pasifik Barat. Secara umum kawasan dengan pajak rokok tertinggi terjadi di Asia Tenggara dengan dipelopori oleh Thailand yang menerapkan pajak rokok sebesar 79 persen dari harga rokok. Indonesia menerapkan pajak rokok sebesar 22,0 persen, relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia. Di kawasan Asia Tenggara pajak rokok di Indonesia paling rendah, sebaliknya Thailand menerapkan pajak rokok yang tinggi untuk melindungi rakyatnya.

Tabel 7. Besaran dan Kisaran Pajak/Cukai Rokok di Negara-Negara Dunia

Kelompok Negara	Jumlah Negara	% Pajak thd harga rokok	Kisaran Pajak Rokok (\$)	Negara dng Tingkat Pajak	
				Terendah	Tertinggi
Afrika	46	32,48	2 – 79	Benin	Seychelles
Amerika	35	35,41	2 – 70	St. Vincent	Uruguay
Timur Tengah	22	41,13	2 – 68	Libia	Bahrain & Kuwait
Eropa	53	50,67	8 – 69	Moldova	Israel
Asia Tenggara	11	55,12	22 – 79	Indonesia	Thailand
Pasifik Barat	27	43,77	9 – 84	Kamboja	Niue
Dunia	194	41,81	2 – 84	Benin, Libia	Niue
<i>Indonesia</i>	-	22,00	-	-	-

Sumber: Manpower, WHO, 2008 (diolah)

Larangan dan pembatasan terhadap iklan rokok di media massa juga menjadi tuntutan masyarakat dan kebijakan negara-negara dunia. Media massa tersebut meliputi TV, radio, Majalah, Surat kabar, Billboard dan Internet. Dari informasi yang dihimpun WHO, Kebijakan pembatasan/larangan iklan rokok paling banyak dilakukan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, Eropa dan Asia Tenggara, terutama terhadap iklan di TV dan Radio. Di Timur Tengah disamping TV dan radio pembatasan iklan rokok juga dilakukan di Majalah dan Billboard. Meskipun pembatasan iklan rokok di kawasan Asia Tenggara cukup besar namun hal ini tidak dilakukan di Indonesia. Produk tembakau tersebut mencakup bentuk rokok, rokok pipa, bidi, kretek, rokok beraroma cengkeh, rokok tanpa asap, cerutu atau lainnya.

Dalam World Conference on Tobacco or Health (WTOH) ke-XIV yang diselenggarakan di Mumbai India, tanggal 8-12 Maret 2009, India secara tegas memperingatkan akan bahaya wabah konsumsi tembakau khususnya rokok yang menyerbu negara-negara berkembang. India sejak Oktober tahun 2008 melarang rokok diiklankan dan dipromosikan di media massa, media luar ruang, maupun menjadi sponsor kegiatan olah raga dan pertunjukan musik. Dalam bulan Mei 2009, India juga menerapkan kewajiban agar kemasan rokok memasang peringatan tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan berusaha agar adegan merokok di film India dilarang.

Disamping secara pelarangan secara fisik dilakukan, perhatian dari kalangan kesehatan juga memberi perhatian terhadap isi iklan tentang adanya variasi produk isi iklan rokok yang seolah-olah aman bagi kesehatan, seperti produk rokok *Mild, light, low tar, full flavor, fruit flavored, chocolate flavored, natural, additive-free, organic cigarette, PREPS (Potentially Reduced-Exposure Products), harm-reduced* atau lainnya. Kalangan kesehatan mengingatkan bahwa produk tembakau dalam berbagai jenis, dengan terselubung nama dan rasa apapun sama bahayanya.

Di banyak negara terutama negara maju, diberlakukan larangan merokok di perkantoran dan tempat umum. Di Amerika Serikat, walaupun secara federal belum meratifikasi Konvensi Kerangka Untuk Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control - FCTC*), sejumlah Negara bagian sudah amat membatasi promosi rokok dan kebebasan merokok ditempat kerja dan tempat umum. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk larangan promosi dan kegiatan sponsor dari perusahaan rokok, pembagian gratis, diskon dan lainnya (Tabel 8).

Kebijakan lain yang dilakukan oleh banyak negara adalah pembatasan kawasan lingkungan bebas rokok, terutama di area fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, kantor pemerintahan, restoran, bar dan tempat tertutup lain terutama yang menggunakan AC. Di beberapa hotel juga menerapkan sebagai daerah bebas rokok dengan disediakan tempat khusus merokok.

Tabel 8. Kebijakan Negara Dunia dan Indonesia tentang Larangan Promosi dan Sponsorship Rokok

Keompok Negara	Jumlah Negara	Larangan dalam Promosi dan <i>Sponsorship</i>					Sponsor Events
		Distri-busi Gratis	Diskon	Prod Non Temb Ident dg merk rokok ttt	Merk Non Temb dipakai u/ Prod Temb	Penam pilan Prod Temb di acara TV/Film	
Afrika	46	30,43	23,91	28,26	21,74	28,26	39,13
Amerika	35	17,14	8,57	14,28	8,57	2,85	11,42
Timur Tengah	22	63,64	50	54,55	50	63,64	63,64
Eropa	53	47,17	39,62	33,96	26,42	54,71	41,51
Asia Tenggara	11	81,8	18,2	63,6	18,2	63,6	54,4
Pasifik Barat	27	29,63	33,33	25,93	11,11	11,11	29,63
Dunia	194	39.173	29.380	31.956	22.167	34.531	37.104
<i>Indonesia</i>	-	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>

Sumber : Manpower, WHO, 2008

KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP TEMBAKAU

Dengan didasarkan kepada perannya terhadap ekonomi nasional dan secara sosial budaya merokok telah menjadi bagian dari warisan masyarakat Indonesia, maka kebijakan Indonesia terhadap tembakau cenderung lebih kepada memelihara industri tembakau dan rokok sebagai aset bangsa. Hal ini terlihat dari belum adanya niat dari pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Untuk Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control - FCTC*), yang diadopsi pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia pada Mei 2003. FCTC merupakan sebuah traktat hukum internasional yang mengikat yang mengatur tentang rokok sebagai bahan adiktif. Dari 193 negara dunia anggota WHO, 161 negara sudah menandatangani dan meratifikasi FCTC, sementara Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi FCTC bersama dengan negara seperti Columbia, Eritreria, Guinea Bissau, Monaco, Rusia, Siera Leone, Somalia, Tajikistan, Uzbekistan, Zambia dan Zimbabwe.

Dalam pengendalian bahaya rokok, kebijakan yang ada di Indonesia dinilai relatif lebih kompromistis terhadap industri rokok. Langkah yang baru ditempuh pemerintah Indonesia baru dalam tahap mengingatkan masyarakat akan bahaya tembakau/rokok dalam bentuk kewajiban penerapan peringatan pada bungkus rokok akan bahaya rokok terhadap kesehatan. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, kewaspadaan Indonesia terhadap bahaya rokok dinilai sangat jauh tertinggal. Pemerintah Singapura dan Malaysia menerapkan aturan yang tegas terhadap perokok. Hal yang sama juga berlaku di Thailand. Pada tahun 1989 ketika Thailand ditekan oleh Amerika

Serikat dan diadukan oleh Amerika Serikat ke WTO berkaitan dengan pembatasan rokok, dan dua tahun kemudian (1991) parlemen Thailand meloloskan peraturan tentang pembatasan pemasaran dan iklan rokok, dengan alasan untuk melindungi kesehatan jutaan warganya.

Pada kondisi demikian maka bagi industri rokok masyarakat Indonesia merupakan pasar yang potensial. Beberapa kondisi dasar berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: (1) jumlah penduduk Indonesia besar dan dengan tingkat partisipasi penduduk yang merokok juga besar, (2) tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat partisipasi perokok muda cukup besar, (3) kebijakan harga rokok dan pajak rokok di Indonesia relatif murah dibanding rata-rata negara dunia, (4) keleluasaan dari perusahaan rokok mempromosikan karena tidak adanya pembatasan tentang iklan, promosi dan sponsorship, dan (5) secara nasional juga belum ada kebijakan penetapan kawasan lingkungan bebas rokok.

Besarnya potensi Indonesia sebagai pasar rokok menjadikan Indonesia sebagai sasaran produksi dan pasar bagi perusahaan rokok multinasional, hal ini tercermin dari masuknya perusahaan multi nasional yaitu Phillip Morris Internasional (PMI) dan BAT (British American Tobacco) membeli pabrik rokok besar Indonesia yaitu PT HM Sampurna dan PT Bentoel untuk lebih leluasa mengembangkan bisnis rokoknya di Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka manfaat terbesar dari bisnis rokok akan dinikmati oleh perusahaan asing tersebut, sementara masyarakat dan negara akan menerima dampak negatif kesehatan yang ditimbulkan dalam bentuk besarnya biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Sementara dengan dana promosi yang cukup besar, kalangan industri rokok terus berupaya memperluas pasar dengan sasaran perokok kepada kalangan muda dalam bentuk promosi dan sponsor pertunjukan musik, olah raga dan kegiatan lainnya yang melibatkan kalangan muda.

Dengan didasarkan kepada semakin besarnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok telah memunculkan penentangan terhadap rokok di Indonesia oleh beberapa kalangan yang peduli kesehatan dan lingkungan. Penentangan ini semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya gerakan dan penentangan anti rokok yang lebih besar di negara maju. Bahkan di negara maju, seperti di Amerika Serikat dan negara negara Eropa, aksi penentangan tersebut telah memperoleh sambutan pemerintah dengan dibuktikan oleh tidak lagi diberikannya dukungan ekonomi, politis dan hukum.

Meskipun dinilai kontroversial, langkah maju dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menfatwakan bahwa rokok haram bagi anak anak dan wanita, namun fatwa tersebut oleh beberapa kalangan dinilai tidak tegas dan bersifat anti gender karena dalam fatwa tersebut tidak melarang untuk laki-laki dewasa. Langkah maju lain adalah dengan disyahrkannya Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di dalamnya menyatakan bahwa nikotin merupakan zat adiktif. Ayat ini dapat menjadi dasar bagi pengaturan dan pembatasan tembakau di Indonesia.

Meskipun secara nasional pemerintah pusat belum mengeluarkan peraturan tentang pembatasan untuk merokok, beberapa pemerintah daerah seperti di DKI Jakarta dan Kota Tangerang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan merokok di tempat umum. Di DKI Jakarta perda larangan merokok ditempat umum telah diberlakukan sejak tahun 2006 dengan prioritas larangan merokok di perkantoran, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum dan tempat umum seperti terminal, restoran, kafe dan mal. Langkah ini dinilai positif dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif merokok.

Pada bagian lain terdapat kelompok yang mengharapkan sebaliknya yang berharap industri rokok dapat tumbuh berkembang lebih pesat karena merupakan aset nasional. Mereka adalah kelompok yang selama ini bergerak di bidang industri tembakau dan rokok, seperti petani tembakau, industri rokok dan buruh industri rokok. Berbagai upaya penentangan dilakukan bagi kegiatan yang mengarah untuk membatasi industri rokok, karena berkaitan dengan masa depan lapangan kerja dan sumber pendapatan rumah tangga mereka.

DILEMA KEBIJAKAN TEMBAKAU INDONESIA

Dengan semakin kuatnya penentangan masyarakat akan mempengaruhi bisnis tembakau dunia dan tentunya akan mempengaruhi sistem agribisnis tembakau Indonesia. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir permintaan dan produksi produk daun tembakau mengalami penurunan. Hasil penelitian Rachmat dan Nuryanti (2009) menunjukkan bahwa sejak tahun 2000-an agribisnis tembakau dunia mulai menampakkan penurunan, seperti ditunjukkan oleh penurunan laju luas areal tembakau, penurunan laju produksi dan konsumsi tembakau dan rokok. Kondisi ini merupakan dampak dari meningkatnya tekanan masyarakat dunia yang semakin peduli akan kesehatan dan lingkungan sehingga gerakan anti rokok semakin meluas terutama di negara maju. Dinamika tersebut kemudian direspon oleh negara maju dengan menerapkan kebijakan pembatasan rokok, dan hal ini berdampak adanya pergeseran produksi tembakau ke negara berkembang.

Indonesia merupakan sasaran bagi industri negara maju untuk memindahkan basis industri dan pasarnya, dan hal ini menyebabkan industri rokok di Indonesia masih menunjukkan gairah. Dalam kurun dekade terakhir produksi rokok Indonesia masih menunjukkan peningkatan. Kenyataan ini menunjukkan apabila tidak ada perubahan kebijakan maka Indonesia dapat menjadi basis industri rokok dunia oleh perusahaan rokok multinasional. Hal ini tentunya akan berdampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang mungkin diperoleh adalah manfaat cukai dan gairah industri rokok dan tembakau. Namun manfaat terbesar nilai tambah industri tersebut tentunya akan dinikmati oleh

perusahaan rokok besar dan multinasional. Sementara itu dengan dijadikannya sebagai garapan pasar maka jumlah perokok di Indonesia akan meningkat dan sudah pasti dampak negatif yang ditimbulkannya akan semakin meningkat dan adanya berarti pula meningkatnya biaya kesehatan masyarakat dan biaya sosial lain. Adanya indikasi perusahaan rokok besar dan multinasional yang berada di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar utama tercermin dari proporsi produksi rokok kretek yang semakin meningkat sementara proporsi rokok putih semakin menurun (Rachmat *et al.*, 2009). Seperti diketahui rokok kretek merupakan rokok khas Indonesia yang umumnya hanya dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Dengan meningkatnya gerakan kesehatan dan gerakan anti rokok, maka dapat diprediksikan dalam jangka panjang permintaan akan rokok dunia akan menurun. Kebijakan pertembakauan jangka panjang perlu mengantisipasi keadaan ini secara serius. Mengingat dampak buruk rokok terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, sangat perlu upaya untuk meminimalisasi dampak rokok dengan cara mensubstitusi industri rokok dan pertanaman tembakau dengan bidang industri dan tanaman lain yang lebih bermanfaat.

Upaya untuk meminimalisasi dampak negatif rokok adalah dengan cara mengurangi jumlah perokok dan tingkat konsumsi rokok masyarakat. Beberapa kebijakan dapat diterapkan melalui peningkatan harga rokok, peningkatan cukai rokok, pengaturan promosi rokok secara bertanggung jawab (seperti iklan rokok dan kegiatan sponsor kegiatan yang melibatkan generasi muda) dan pembatasan kawasan bebas rokok.

Substitusi tanaman tembakau dapat dilakukan melalui tanaman alternatif yang mempunyai nilai ekonomi yang minimal setara. Hal ini bukan hal yang mudah, karena: (a) secara teknis, tanaman tembakau mempunyai keunggulan diusahakan pada lahan dan iklim yang kering, (b) secara ekonomi, komoditi tembakau relatif mempunyai tingkat pendapatan usahatani yang tinggi dan tidak banyak komoditi yang menyamai tingkat pendapatan tersebut, meskipun mempunyai derajat resiko tinggi pula, dan (c) secara sosial, pada daerah tertentu komoditi tembakau merupakan komoditas yang telah diusahakan secara turun temurun sehingga menjadi bagian budaya dari pola pertaniannya.

PENUTUP

Industri tembakau dan budaya merokok telah lama menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terhadap industri tembakau ini, Indonesia dihadapkan kepada situasi yang dilematik, disatu sisi berperan dalam perekonomian nasional dan di sisi lain berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Peran tembakau dalam perekonomian nasional dapat

dilihat dari beberapa indikator seperti perannya dalam penerimaan negara, sumber lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang potensial dijadikan sebagai pasar rokok oleh produsen rokok nasional dan dunia, karena jumlah penduduk besar, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan tingkat partisipasi penduduk dan khususnya perokok muda yang cukup besar. Saat ini industri rokok Indonesia sebagian besar dimiliki oleh pemodal besar dan asing, sehingga nilai tambah terbesar rokok dinikmati oleh pemodal besar dan asing tersebut, sementara masyarakat Indonesia hanya akan menerima dampak negatif dari rokok.

Tembakau merupakan produk yang legal dan oleh karenanya telah dan akan terus memperburuk derajat kesehatan masyarakat. Ancaman dampak negatif terhadap kesehatan mengharuskan adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah dengan sasaran mengurangi jumlah perokok dan tingkat konsumsi rokok, serta mensubstitusi industri rokok dan substitusi tanaman tembakau. Indonesia harus segera menandatangani dan meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC.), dan menerapkan rekomendasi dari WHO berkaitan dengan upaya penanggulangan tembakau. Ketegasan pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap dampak negatif rokok diperlukan melalui langkah peningkatan harga rokok, kenaikan cukai rokok, pembatasan promosi rokok dalam iklan rokok dan kegiatan sponsor yang melibatkan generasi muda.

Dalam jangka panjang sejalan dengan meningkatnya gerakan kesehatan dan gerakan anti rokok di dunia, maka permintaan rokok akan menurun. Kondisi ini perlu diantisipasi dan menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang tembakau. Sejak awal perlu dilakukan upaya untuk secara bertahap mensubstitusi industri rokok dan pertanaman tembakau dengan bidang industri dan tanaman lain yang lebih bermanfaat bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia, dalam angka. Jakarta: CV. Dua Marga Jaya.
- Bank Indonesia, 2008. Laporan Tahunan Bank Indonesia
- Barber, S., Adioetomo, S.M., Ahsan A., dan Setyonaluri, D. 2008. Tobacco Economic in Indonesia. Laporan Penelitian. Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budiman, A. dan Onghokham. 1987. Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara, PT. Djarum, Kudus.
- Departemen Keuangan, 2008. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

- Hadi, P. U., R. Kustiari dan I. S. Anugrah. *Case Study on Tobacco Cultivation and Alternate Crops in Indonesia*. Final Report. Jakarta: A Collaborative Research between ICASEPS and WHO.
- Hasbullah, T. dan T.Djutaharta. 2008. Biaya Kesehatan Akibat Konsumsi Rokok di Indonesia. Makalah disampaikan pada seminar nasional ” Manfaat Peningkatan Cukai Tembakau di Indonesia. Jakarta, 21 Agustus 2008
- Rachmat, M dan Nuryanti, S. 2009. Dinamika Agribisnis Tembakau Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Forum Penelitian AgroEkonomi*. 27 (2): 73-91. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian
- Rachmat, M., Khairina, Sri Nuryanti, Rizma Aldillah dan Waluyo. 2009. Prospek Ekonomi Tembakau Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian
- Santoso, K., Januar, J., Hartadi, R., Wardhono, A., Rondhi, M. 2009. *Tembakau dan Industri Rokok: Kontribusi Terhadap Perekonomian Nasional, Serapan Tenaga Kerja, Perilaku Konsumsi, dan Perspektif Petani*. Jember: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember; 2009.
- Sudaryanto, T., Prajogo U. Hadi, S. Friyatna. 2009. “Analisis Prospek Ekonomi Tembakau di Pasar Dunia dan Refleksinya di Indonesia Tahun 2010”, online di www.balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/agribisnis/analisis_prospek.pdf
- WHO. 2008. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. The Manpower Package. World Health Organization.